Keberhasilan Serikat Petani Indonesia dalam Perjuangan Hak Asasi Petani Tahun 2001 - 2018 ***The Success of the Serikat Petani Indonesia (Indonesian Farmers Union) in the Struggle of Peasant Rights 2001 - 2018***

Mujahid Widian* & Nur Iman Subono

Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Indonesia

Diterima: 22 Mei 2019; Disetujui 24 Agustus 2019; Dipublikasikan 01 Desember 2019

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang keberhasilan Serikat Petani Indonesia (SPI) dalam perjuangan hak asasi petani selama tahun 2001 – 2016. Dalam menganalisis studi kasus di atas, penelitian ini menggunakan teori pendekatan integrasi gerakan sosial yang merupakan upaya sintesa dari tiga dimensi/pendekatan yaitu struktur kesempatan politik, struktur mobilisasi sosial, dan pembingkai kultural. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data-data penelitian ini bersumber dari wawancara serta dokumen dan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan SPI dalam perjuangan hak asasi petani tahun 2001 – 2018 dapat dilihat dari disahkannya 'Deklarasi Hak Asasi Petani dan Masyarakat yang Bekerja di Pedesaan' atau UNDROP oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Keberhasilan tersebut tidak dilepaskan dari berperannya masing-masing dimensi/pendekatan, yakni kombinasi antara faktor keterbukaan politik di Indonesia, keberhasilan SPI dalam menjalin jejaring aliansi di berbagai tingkatan (lokal-internasional), dan konstruksi ide mengenai hak asasi petani yang dapat diterima secara universal.

Kata kunci: Serikat Petani Indonesia, Gerakan Sosial, Petani, Hak Asasi Petani.

Abstract

This study analyzes the success of the Indonesian Farmers Union (SPI) in the peasant rights struggle during 2001 - 2016. This study uses the social movement integration approach which is an attempt to synthesize three dimensions / approaches: the structure of political opportunity; structure of social mobilization; and cultural framing. This study uses qualitative research methods with study case approach. The research data is sourced from interviews and documents and literature related to this study. The analysis indicates that the success of SPI in peasant rights struggles in 2001 - 2018 can be seen from the ratification of 'Declaration Peasant Rights and Other People Working in Rural Area' or UNDROP at the International level. This success can't be separated from the role of each dimension / approach, namely a combination of factors of political openness in Indonesia, the success of the SPI in networking alliances at various levels (local-international), and the construction of ideas on the rights of farmers that can be accepted universal.

Keywords: Indonesian Farmers Union, Social Movement, Peasant, Peasant Rights.

How to Cite: Widian, Mujahid & Subono, N.I. (2019). Keberhasilan Serikat Petani Indonesia dalam Perjuangan Hak Asasi Petani Tahun 2001 – 2016. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 7(2): 132-147.

*Corresponding author:

E-mail: mujahid.widian@gmail.com

ISSN 2549-1660 (Print)

ISSN 2550-1305 (Online)

PENDAHULUAN

Petani merupakan suatu entitas yang berjumlah besar, di mana saat ini petani gurem (yang menyewa lahan ataupun kepemilikan lahannya dibawah 0,5 ha), petani kecil, dan buruh tani tanpa tanah, jumlahnya mencapai sepertiga dari penduduk bumi (Syahyuti, 2013). Dalam konteks Indonesia, petani bahkan menjadi identitas yang menyatu dengan citra Indonesia sebagai negara agraris. Menurut Badan Pusat Statistik (2017), petani maupun orang-orang yang bekerja di sektor agraria sampai saat ini masih menjadi pekerjaan yang dilakoni oleh masyarakat Indonesia.

Hanya saja meskipun mayoritas penduduknya menggantungkan diri pada sektor pertanian, upaya perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak petani masih menjadi momok di Indonesia. Hal ini lantas mendorong diperlukannya seperangkat instrumen perlindungan yang menjamin terpenuhinya hak-hak petani atas faktor-faktor produksinya, seperti hak atas tanah, benih, sampai dengan hak-hak sosial yang melekat pada dirinya.

Pada dasarnya, sudah terdapat beberapa instrumen hukum yang mengatur hak-hak petani di Indonesia, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut dengan UUPA 1960), TAP MPR No. IX/2001, dan peraturan-peraturan lainnya. Hanya saja dalam praktiknya, peraturan-peraturan tersebut tidak dijalankan dengan baik.

Kebijakan pembangunan agraria dan sektor pertanian di Indonesia, yang paling menonjol pada masa Orde Baru, berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan kepentingan kapital, dibandingkan pemerataan pertumbuhan. Hal ini dapat dilihat dari dikeluarkannya peraturan-peraturan yang berkontradiksi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak petani kecil, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman

Modal Asing, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan, yang mengakibatkan sumber-sumber agraria semakin tidak dapat diakses oleh petani kecil.

Kebijakan pembangunan pada masa Orde Baru tersebut mewariskan sejumlah masalah bagi sektor agraria maupun pertanian Indonesia saat ini, salah satunya adalah konflik agraria antara petani dengan korporasi (baik itu milik swasta maupun negara). Tren mengenai konflik agraria yang terjadi di Indonesia terus terjadi bahkan sampai dengan saat ini. Bentuk-bentuk kekerasan, kriminalisasi, dan perampasan faktor-faktor produksi yang idealnya dimiliki oleh petani menjadi permasalahan yang acapkali muncul.

Tabel 1
Konflik Agraria Tahun 2012 - 2016 di Indonesia

Tahun	Jumlah Konflik Agraria	Jumlah Korban
2012	198 kasus	3 orang tewas, 76 orang mengalami kriminalisasi
2013	369 kasus	21 orang tewas, 30 tertembak, 130 orang menjadi korban penganiayaan, serta 239 orang ditahan oleh aparat keamanan.
2014	143 kasus	2 orang tewas, 90 orang mengalami kekerasan, 89 mengalami kriminalisasi/ditahan, dan 3.000 orang lebih tergesur.
2015	231 kasus	3 orang tewas, 194 mengalami tindak kekerasan, 65 mengalami kriminalisasi, dan pengusuran terhadap 2.700 kepala keluarga.
2016	450 kasus	13 orang meninggal dunia, 66 mengalami tindak kekerasan, 177 ditahan/kriminalisasi.

Sumber: Diolah dari Catatan Akhir Tahun Serikat Petani Indonesia, tahun 2012, 2013, 2014, dan 2015; serta Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria 2017.

Tingginya angka konflik agraria dan kondisi pelanggaran dan perampasan terhadap hak-hak petani kemudian mendorong organisasi gerakan petani di Indonesia untuk melakukan perjuangan dan kampanye terkait isu hak-hak petani. Salah satu organisasi petani yang secara konsisten mengangkat permasalahan hak asasi petani adalah Serikat Petani Indonesia (SPI).

Kampanye yang dilakukan oleh SPI terkait perlindungan dan kesejahteraan petani dituangkan dalam pokok gerakannya yakni 'hak asasi petani'. Perjuangan SPI dituangkan dalam berbagai bentuk aksi, dimulai dari kampanye, mobilisasi massa, perumusan kebijakan alternatif, sampai dengan melakukan lobi kebijakan.

Perjuangan SPI dalam kampanye hak asasi petani membuahkan hasil. Pada tahun 2018 lalu, Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengesahkan 'Deklarasi tentang Hak Asasi Petani dan Masyarakat yang Bekerja di Pedesaan' atau *United Nations Declaration on the Rights of Peasant and Other People Working in Rural Areas* (selanjutnya disingkat sebagai UNDROP). UNDROP terdiri dari 28 pasal yang memuat pengakuan terhadap hak-hak yang melekat pada petani dan orang-orang yang bekerja di pedesaan (peternak, penggembala, dan sebagainya), seperti hak atas tanah, hak atas benih, hak atas air, hak atas pengelolaan sumberdaya dan sebagainya, serta menjamin perlindungan bagi petani dan orang-orang yang bekerja di pedesaan atas kesetaraan gender, kebebasan berpolitik dan membentuk serikat, serta dari hal-hal yang mengancam kehidupannya. UNDROP dalam hal ini menjadi sebuah norma internasional, dan menjadi acuan bagi negara-negara anggota PBB untuk merumuskan instrumen perlindungan maupun kebijakan bagi petani dan orang-orang yang bekerja di pedesaan.

Penelitian ini akan menganalisis bagaimana keberhasilan perjuangan SPI

dalam konteks disahkannya Deklarasi UNDROP. Disahkannya Deklarasi UNDROP tersebut tidak dapat dilepaskan dari perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh SPI di berbagai tingkatan, baik itu di tingkat lokal, nasional (Indonesia), sampai dengan internasional, dengan memfokuskan pada beberapa dimensi yakni: *pertama*, keterbukaan sistem politik di Indonesia yang memberikan ruang bagi munculnya gerakan petani sekaligus membuka ruang terjalinnya kerjasama antara masyarakat dengan elit pemerintahan; *Kedua*, penelitian ini juga akan melihat bagaimana SPI sebagai gerakan sosial petani menggunakan dan memanfaatkan sumberdaya-sumberdaya yang dimiliki dalam kerangka perjuangan penegakan di Indonesia. *Ketiga*, penelitian ini akan melihat bagaimana strategi yang dilakukan oleh SPI dalam membangun sebuah kesamaan persepsi dan kampanye untuk menggali simpati dalam kerangka perjuangan hak asasi petani di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan teori pendekatan integrasi gerakan sosial sebagai dasar analisis. Teori pendekatan integrasi gerakan sosial dikemukakan oleh para McAdam, McCarthy, & Zald (1996) sebagai respons dari kecenderungan akademisi maupun peneliti di bidang politik, yang menitikberatkan pada faktor tunggal untuk menjelaskan bagaimana keberhasilan gerakan sosial dalam mendesak sebuah isu. Teori pendekatan integrasi gerakan sosial lantas menyatakan bahwa gerakan sosial sangat dipengaruhi oleh tiga faktor/dimensi, yaitu: (1) Struktur Kesempatan Politik; (2) Struktur Mobilisasi Sosial; dan (3) Pembingkai Kultural.

Pada dimensi struktur kesempatan politik, menurut Doug McAdam (1996), kemunculan suatu gerakan sosial dapat dilihat dari tersedianya peluang akibat dari perubahan/pergantian struktur institusional dan disposisi ideologis dalam suatu pemerintahan. Struktur kesempatan politik dapat dibedakan lagi ke dalam

empat dimensi, yaitu: (1) relatif terbuka atau tertutupnya suatu pemerintahan politik; (2) stabil atau tidaknya stabilnya dari berbagai hubungan antar kelompok yang berkuasa; (3) ada atau tidak adanya persekutuan antara kekuatan-kekuatan (elite) dalam masyarakat; dan (4) kapasitas dan kecenderungan negara untuk melakukan tindakan represi.

Sementara itu, struktur mobilisasi diartikan sebagai wadah kolektif, baik itu berbentuk formal maupun informal, yang didalamnya orang-orang memobilisasi dan terlibat tindakan kolektif. Struktur mobilisasi berfokus pada tingkat kelompok-meso, organisasi, dan jaringan informal yang terdiri dari blok bangunan kolektif dari gerakan sosial dan revolusi. Struktur mobilisasi dapat dibedakan ke dalam kategori, yakni bersifat formal maupun non-formal dan bersifat gerakan maupun non-gerakan.

Terakhir, dimensi pembingkaihan kultural (*framing*) menjadi faktor yang menghubungkan antara faktor struktur kesempatan politik dan struktur mobilisasi. Pembingkaihan kultural berkaitan dengan upaya para pelaku perubahan mempengaruhi makna dalam kebijaksanaan publik. Oleh karena itu, pelaku perubahan memiliki tugas penting mencapai perjuangannya melalui pembentukan *framing* atas masalah-masalah sosial dan ketidakadilan.

Ketiga faktor/dimensi tersebut, dalam teori integrasi gerakan sosial, saling berhubungan satu sama lain dan saling mempengaruhi. Dalam konteks penelitian ini, ketiga dimensi tersebut dilihat sebagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan SPI dalam pengesahan UNDROP sebagai salah satu instrumen perlindungan HAM di PBB.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian studi kasus. Penelitian kualitatif, menurut Creswell (2016), merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan

memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Senada dengan hal tersebut, Strauss & Corbin (2003) berpandangan bahwa penelitian kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu di balik fenomena yang sedikit pun belum diketahui. Metode ini dapat juga digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui.

Selanjutnya, pendekatan studi kasus digunakan untuk dapat melihat dan memahami lebih jauh konteks suatu peristiwa. Dalam penelitian ini yang menjadi studi kasus adalah keberhasilan perjuangan yang dilakukan oleh SPI dengan disahkannya UNDROP sebagai salah satu instrumen penegakan hak asasi manusia di PBB.

Keberhasilan SPI atas disahkannya UNDROP tersebut tidak dapat dipisahkan dari perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh SPI di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat lokal dan nasional (di Indonesia), sampai dengan internasional, dimulai dari tahun 2001 sampai dengan 2018. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, yakni dengan pengurus SPI di tingkat pusat dan daerah serta pihak-pihak yang membantu SPI dalam agenda penegakan hak asasi petani di tingkat internasional. Selain itu penelitian ini juga akan menggunakan data-data sekunder, yang dihimpun dari literatur dan dokumen milik organisasi, guna melengkapi data yang didapatkan dari wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyajian analisis mengenai keberhasilan SPI dalam perjuangan hak asasi petani selama 2001 – 2016 akan dibagi ke dalam sub-sub pembahasan, sesuai dengan 3 dimensi yang terdapat teori integrasi gerakan sosial. Adapun ketiga dimensi tersebut adalah struktur kesempatan politik, struktur mobilisasi sosial, dan proses pembingkaihan kultural.

Struktur Kesempatan Politik

Ditinjau dari dimensi struktur kesempatan politik, keberhasilan SPI dalam mendorong pengesahan UNDROP tidak terlepas dari konteks kemunculan perjuangan petani di Indonesia. Secara khusus hal ini menyoroti dinamika politik di Indonesia pada tahun 1998, yang menghasilkan beberapa kondisi yakni: (1) Berakhirnya pemerintahan Orde Baru dan diikuti terbukanya sistem politik di Indonesia dan proses demokratisasi di berbagai sektor. Hal ini kemudian mendorong kemunculan gerakan-gerakan masyarakat sipil, termasuk SPI sebagai organisasi gerakan petani, untuk mengemukakan tuntutan terkait konflik agraria dan pelanggaran hak-hak petani yang terjadi selama pemerintahan Orde Baru; dan (2) Mencairnya hubungan/relasi antara masyarakat dengan penguasa, yang dapat dilihat dari hubungan SPI dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia (RI) dalam formalisasi dan kampanye isu hak asasi petani di Indonesia.

Terbukanya Sistem Politik Pasca Berakhirnya Pemerintahan Orde Baru

Masa Orde Baru dinilai menjadi momok bagi gerakan agraria di Indonesia. Selama 32 tahun berkuasa, pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Suharto menjalankan konsep korporatisme negara (dalam wadah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia - HKTI) yang tidak memungkinkan bagi tumbuh kembangnya organisasi petani yang kritis dan independen. Upaya-upaya untuk mendirikan sebuah organisasi/gerakan petani skala nasional selalu dibungkam oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang represif.

Berakhirnya pemerintahan Orde Baru, secara langsung berdampak pada perubahan sistem politik di Indonesia, yang sebelumnya otoriter serta represif menjadi lebih terbuka dan demokratis.

Masa transisi dari pemerintahan Orde Baru atau yang disebut juga masa reformasi, kemudian menjadi momen kemunculan organisasi petani yang independen di berbagai wilayah Indonesia. Aktivitas untuk melakukan pengembangan-pengembangan jaringan, sampai dengan pendeklarasian organisasi tani terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Gerakan-gerakan petani yang pada masa Orde Baru bergerak secara tertutup, kemudian berani muncul ke muka umum pada masa reformasi.

Hal ini tidak terkecuali bagi Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI), yang merupakan format awal dari SPI. FSPI dideklarasikan pada tanggal 8 Juli 1998 di Bandar Pulau, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Selain SPI, kemunculan gerakan-gerakan petani maupun yang berkonsentrasi pada masyarakat pedesaan mulai mendeklarasikan dirinya. Hal ini bisa dilihat dari dideklarasikannya sejumlah organisasi seperti Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN) tahun 1999, Ikatan Petani Pengendali Hama Terpadu Indonesia (IPPHTI) tahun 1999, dan beberapa organisasi rakyat lainnya.

Kemunculan organisasi-organisasi tersebut menjadikan pembahasan isu-isu agraria di Indonesia menjadi lebih dinamis. Berbagai kondisi objektif petani dan masalah agraria di akar rumput yang sebelumnya tidak diakomodir, kini dapat diartikulasikan di konstelasi politik nasional. Dalam konteks ini, SPI menyuarakan mengenai urgensi dari pembaruan agraria sebagai dasar kebijakan pembangunan di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya konflik agraria yang terjadi pada masa Orde Baru, sehingga diperlukan serta pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak petani.

Menjalin Hubungan dengan Lembaga Negara dalam Perumusan Ide Hak Asasi Petani. Terbukanya sistem politik di Indonesia pasca berakhirnya Orde Baru mencairkan hubungan antara rakyat

dengan elit pemerintahan yang selama ini kaku. Indikasi mencairnya hubungan antara elit pemerintahan dengan organisasi petani dapat dilihat dari munculnya lembaga negara yang menjalin komunikasi dengan masyarakat, melalui wadah organisasi petani, terkait maraknya kasus-kasus konflik agraria yang terjadi di Indonesia, salah satunya adalah Komnas HAM RI.

Selama transisi dari pemerintahan Orde Baru menuju reformasi, Komnas HAM RI pro-aktif dalam menangani berbagai bentuk pengaduan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Adapun yang kasus-kasus yang diadukan mencakup pelanggaran hak sipil dan politik, maupun pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk pelanggaran terhadap hak-hak petani.

Tidak hanya berfokus pada mediasi dan upaya penyelesaian konflik agraria (kasus per kasus), Komnas HAM juga berinisiatif untuk merumuskan suatu kerangka baru perlindungan bagi petani, sebagai sebuah upaya preventif munculnya konflik-konflik agraria di Indonesia.

Hal ini kemudian mendorong Komnas HAM RI menyelenggarakan sebuah konferensi untuk merumuskan konsep perlindungan terhadap petani di Indonesia, yang didasarkan pada kondisi realitas (permasalahan apa yang dihadapi oleh petani) dan merumuskan 'apa-apa saja yang dimaksud dengan hak petani'. Inisiatif Komnas HAM untuk merumuskan sebuah konsep perlindungan petani Indonesia juga bersamaan dengan munculnya pembahasan mengenai hak asasi petani oleh organisasi petani dan lembaga-lembaga kajian agraria di berbagai wilayah Indonesia¹.

Hal tersebut kemudian menjadi awal bagi SPI untuk menjalin hubungan dengan Komnas HAM. Ide mengenai kerangka perlindungan bagi para petani di Indonesia, dinilai sesuai dengan konsep hak asasi petani yang sudah dirumuskan sebagai salah satu pokok dari gerakan SPI. Upaya untuk menjalin hubungan dengan Komnas HAM RI kemudian menjadi penting sebagai salah satu bentuk strategi perjuangan. Hal ini bertujuan agar perlindungan hak-hak petani dan penyelesaian kasus konflik agraria yang nantinya dirumuskan mendapatkan legitimasi, karena melibatkan lembaga negara dalam perumusannya.

Inisiatif untuk membentuk sebuah konsep perlindungan terhadap petani di Indonesia kemudian direalisasikan dalam bentuk 'Konferensi Nasional Pembaharuan Agraria untuk Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Petani' (selanjutnya disebut dengan Konferensi Cibubur) di Cibubur, Jawa Barat pada tanggal 17 hingga 20 April 2001. Konferensi ini melibatkan banyak pemangku kepentingan, termasuk didalamnya para petani yang tergabung didalam organisasi petani. Komnas HAM dalam konferensi tersebut bertindak sebagai Ketua Panitia Pengarah, sementara itu SPI bertindak sebagai Ketua Panitia Pelaksana².

Konferensi Cibubur menghasilkan sebuah dokumen mengenai 'Deklarasi Hak-Hak Asasi Petani Indonesia' (selanjutnya disebut sebagai Deklarasi HAP Indonesia), sebuah dokumen yang

¹ Di tingkat lokal, antara periode tahun 1998 hingga 2001 forum-forum petani, organisasi masyarakat sipil dan pegiat agraria sudah melakukan pembahasan, bahkan sudah melahirkan perumusan, mengenai apa itu hak asasi petani seperti yang dilakukan oleh IPPHTI, Yayasan Cindelaras, dan INSIST di Yogyakarta. Menurut Francis Wahono

(2005) mencatat forum-forum tersebut seperti: (1) Forum Pertemuan USD - 14 Agustus 1999; (2) Forum Bundaran UGM - 26 Juli 2000; (3) Forum Pecinta Petani - 29 Juli 2000; dan (4) Forum Medan (FSPI) - 11 September 2000.

² Konferensi Cibubur 2001 secara keseluruhan melibatkan 225 orang, dengan rincian 100 orang petani, 50 orang LSM dan akademisi. Adapun nama-nama organisasi petani, LSM, pegiat agraria serta rincian mengenai jalannya Konferensi Cibubur dapat dibaca lebih lanjut dalam Francis Wahono (2005).

menjadi kerangka dasar bagi perjuangan hak asasi petani di Indonesia. 'Deklarasi HAP Indonesia' terdiri dari 8 Bagian dan 67 butir yang isinya memuat apa-apa saja yang dikategorisasi sebagai hak asasi petani, yaitu: (a) Hak-petani atas hidup; (b) Hak atas penguasaan dan pemakaian sumber daya alam dan kemampuan pribadinya; (c) Hak petani atas berproduksi; (d) Hak petani atas konsumsi; (e) Hak petani akan pemasaran produk, pengadaan asupan, dan jaminan mutu akan produknya; (f) Hak petani untuk berorganisasi; (g) Hak petani akan perlanjutan keturunannya serta makhluk hidup lainnya yang menjamin kelangsungan hidupnya; (h) Hak petani atas pengungkapan.

Poin-poin di dalam 'Deklarasi HAP Indonesia' menemukan relevansinya apabila dilihat dari konflik-konflik agraria yang terjadi dibarengi dengan tindak kekerasan dan perampasan terhadap tanah yang dimiliki atau dikelola oleh petani. Tanah bagi petani merupakan faktor produksi yang paling menentukan. Ketiadaan akses petani terhadap tanah mengakibatkan petani tidak bisa mendapatkan pendapatan untuk hidup layak, selain itu ketersediaan pangan dan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap pangan sangat ditentukan oleh usaha pertanian dan kerja-kerja yang dilakukan oleh petani di atas tanah mereka.

Isi dari 'Deklarasi HAP Indonesia' kemudian dibawa oleh SPI ke tingkat Internasional. Melalui La Via Campesina, jejaring SPI di tingkat internasional, pada bulan Juni 2008 diadakan "Konferensi Internasional Hak Asasi Petani Menuju Konvensi Internasional" di Indonesia. Konferensi yang melibatkan jaringan internasional La Via Campesina, aktivis HAM dan akademisi yang berasal dari 26 negara, untuk merumuskan langkah-langkah menuju institusionalisasi hak asasi petani. Konferensi ini menghasilkan rumusan mengenai hak asasi petani yang

menyempurnakan 'Deklarasi HAP Indonesia'. Meski demikian, penyempurnaan tersebut tidak banyak mengubah substansi isi 'Deklarasi HAP Indonesia' tahun 2001.

Dimensi Struktur Mobilisasi Sosial

Apabila pendekatan struktur kesempatan politik ditentukan oleh faktor-faktor eksternal (diluar gerakan), maka pendekatan struktur mobilisasi sosial lebih bersifat internal, yakni mengandalkan sumber daya yang tersedia didalam suatu gerakan. Tidak hanya itu, kemampuan organisasi memanfaatkan jejaring-jejaring informal (aliansi, kawan seperjuangan) juga masuk ke dalam dimensi tersebut. Dalam dimensi ini akan dipaparkan bagaimana bentuk mobilisasi yang dilakukan oleh SPI, yang dibedakan ke dalam dua bentuk, yakni aksi massa dan peran jejaring yang dimiliki oleh SPI.

Aksi massa sebagai reaksi atas kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada petani. Aksi massa pada dasarnya merupakan strategi mobilisasi yang lazim dilakukan oleh gerakan sosial maupun organisasi rakyat, termasuk SPI sebagai gerakan petani. Bentuk aksi massa yang dilakukan SPI dapat dibedakan ke dalam dua tipologi. Pertama, aksi massa yang berkaitan dengan momentum atau dalam rangka memperingati suatu peristiwa, yang dilakukan secara rutin setiap tahun; dan kedua, aksi massa sebagai reaksi atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, terjadinya konflik-konflik agraria yang melibatkan anggota SPI maupun pernyataan solidaritas terhadap konflik agraria yang terjadi.

Tipologi mobilisasi massa SPI bentuk pertama dapat dilihat dari beberapa peristiwa, seperti pada saat SPI (pada saat itu masih dalam format FSPI) melakukan peringatan 'Hari Tani Nasional' pada 24 September 1998. Peringatan 'Hari Tani Nasional' ini menjadi istimewa karena hanya berselang hampir 5 bulan pasca pengunduran diri Presiden Suharto, di

bulan Mei 1998. Demonstrasi FSPI ke gedung DPR-RI tersebut dihadiri tidak kurang dari 1000 massa yang terdiri dari petani anggota FSPI dari wilayah Sumatera, Jawa Barat (Ciamis, Garut, Tasikmalaya), Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta terdapat pula elemen mahasiswa. Aksi tersebut juga dilakukan serentak oleh anggota FSPI di beberapa wilayah, seperti Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur (Harahap, 2000).

Demonstrasi yang dilakukan oleh SPI tersebut cukup menyita perhatian media massa. Hal ini mengingat masih terbatasnya organisasi tani yang melakukan aktivitas mobilisasi dan unjuk rasa secara terbuka dan besar-besaran pasca berakhirnya Orde Baru. Selain demonstrasi, SPI juga tercatat melakukan mobilisasi petani secara masif pasca berakhirnya pemerintahan Orde Baru, yakni dengan melaksanakan 'Rapat Umum Petani Indonesia'.

'Rapat Umum Petani Indonesia' yang dihelat pada tanggal 23 Juni 1999 di Gelora Basket Senayan, Jakarta dihadiri sekitar 4.000 petani anggota FSPI. Dalam rapat tersebut terjadi dialog antara para petani dengan perwakilan pemerintahan, yakni Menteri Agraria/Kepala BPN (Hasan Basri Durin), Menteri Negara Kehutanan dan Perkebunan (Muslimin Nasution), dan Menteri Pertanian (diwakili oleh Sekjen Deptan Syarifudin Karama). Agenda Rapat Umum Petani tersebut membahas beberapa masalah yang dihadapi oleh petani yang hadir, seperti kasus-kasus sengketa pertanahan, perundang-undangan, soal pupuk, hingga kesulitan membayar hutang dan pengolahan keripik pisang (Purwanto, 2012).

Menurut peneliti, mobilisasi secara masif yang dilakukan oleh SPI pasca berakhirnya pemerintahan Orde Baru merupakan strategi yang tepat untuk mengampanyekan pokok-pokok gerakan SPI mengenai pembaruan agraria dan pelanggaran hak-hak petani di berbagai

wilayah Indonesia. Mobilisasi massa menjadi alat SPI untuk unjuk kekuatan (*show force*), baik itu secara kuantitas maupun kualitas organisasi, mengingat selama pemerintah Orde Baru kesempatan bagi gerakan petani untuk melakukan tekanan terhadap pemerintah sangat terbatas. Unjuk kekuatan inilah yang kemudian diharapkan dapat membangun posisi tawar SPI (*bargaining position*), sehingga tuntutan-tuntutan dari para petani, seperti tuntutan untuk segera melaksanakan pembaruan agraria dan perlindungan terhadap hak-hak petani didengar oleh pemerintah.

Pada perkembangannya, upaya SPI mendesak agar agenda pembaruan agraria segera dijalankan mendapat respon dari pemerintah. Akhir tahun 2001, agenda pembaruan agraria secara 'resmi' masuk ke dalam agenda politik nasional dengan disahkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) No. IX /MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA) (selanjutnya disebut TAP MPR No. IX/2001).

Disahkannya TAP MPR No. IX /2001 disikapi oleh SPI dengan melakukan mobilisasi untuk menolak isi TAP MPR tersebut. Aksi massa yang dilakukan SPI bertepatan dengan peringatan Hari Tani pada tanggal 24 September 2001. Dalam argumentasinya, SPI melihat terdapat celah dalam TAP MPR tersebut yang berpotensi mengacaukan makna mengenai pembaruan agraria.

SPI menilai TAP MPR No. IX/2001 seharusnya memuat penegasan kembali terhadap UUPA 1960, sebagai dasar kebijakan agraria di Indonesia, namun sebaliknya, berisi pasal yang memberi ruang bagi pihak-pihak yang ingin merevisi atau mencabut UUPA 1960. Kekhawatiran SPI tersebut kemudian dibuktikan dengan dijadikan TAP MPR/IX/2001 sebagai dasar bagi

dikeluarkannya beberapa kebijakan yang bertujuan mengubah UUPA 1960.

Sementara itu, pada tipologi yang kedua, bentuk-bentuk mobilisasi yang dilakukan SPI sangat berkaitan dengan maraknya konflik-konflik agraria di berbagai wilayah Indonesia. Mobilisasi massa ini dilakukan di berbagai tingkatan. Pada umumnya, aksi-aksi lokal anggota SPI akan diikuti oleh massa yang lebih besar di tingkat provinsi. Ketika aksi-aksi lokal yang dilakukan tidak mendapat respon dari pemerintah kabupaten, aksi massa akan dilanjutkan ke tingkat provinsi dengan melibatkan anggota SPI dari seluruh Kabupaten.”

Mobilisasi massa yang berjenjang, dari tingkat basis hingga ke tingkat wilayah administratif yang lebih tinggi (kabupaten atau provinsi misalnya) menunjukkan kesatuan gerak dalam organisasi petani berjalan dengan baik. Pelibatan anggota SPI, di luar dari anggota SPI yang sedang mengalami konflik juga ditujukan untuk menumbuhkan empati dari anggota SPI atau perasaan senasib dan sepenanggungan. Aksi massa dalam hal ini juga diharapkan dapat membentuk kesadaran bagi masyarakat umum, melalui aksi-aksi teatrikal maupun bentuk ekspresi lainnya yang menunjukkan kepada publik kondisi obyektif yang dialami oleh petani, dan mendatangkan simpati bagi gerakan petani.

Mengorganisasikan jejaring eksternal di tingkat nasional dan internasional. Struktur organisasi yang tersebar mulai dari lokal (tingkat basis), wilayah (provinsi), sampai dengan tingkat nasional, memungkinkan SPI memiliki jejaring aliansi yang besar. Keberadaan jejaring aliansi tersebut berperan signifikan, (baik itu bersifat taktis/momentum maupun yang bersifat strategis/jangka panjang). SPI diketahui terlibat aktif dalam pembentukan aliansi maupun koalisi gerakan masyarakat, dengan melibatkan organisasi masyarakat

sipil lain yang memiliki visi yang sama dengan perjuangan SPI.

Pada tingkat lokal, aliansi yang dilakukan oleh anggota SPI berupaya untuk membangun soliditas antara gerakan lintas sektoral, dalam menghadapi berbagai kebijakan yang dinilai merugikan petani. Di Sumatera Utara misalnya, SPI di wilayah tersebut membentuk sebuah aliansi tingkat lokal yang dinamakan ‘Aliansi Kedaulatan Rakyat’, yang menghimpun organisasi-organisasi seperti gerakan buruh (Serikat Buruh Sumatera Utara), gerakan sektor informal perkotaan (Serikat Becak Merdeka), gerakan nelayan (Serikat Nelayan Indonesia), dan organisasi mahasiswa (Himpunan Mahasiswa Islam- HMI).

Pada tingkat nasional, SPI terlibat aktif dalam pembentukan suatu aliansi lintas sektoral yang dinamakan Gerakan Rakyat Melawan Neo-Kolonialisme atau ‘Gerak Lawan’. Pembentukan ‘Gerak Lawan’ yang diinisiasi oleh SPI merupakan bentuk strategi mereka dalam menghimpun organisasi-organisasi masyarakat sipil di Indonesia, yang memiliki kesamaan visi mengenai ancaman neoliberalisme dalam pembangunan maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

‘Gerak Lawan’ sebagai aliansi lintas sektoral organisasi massa di Indonesia melihat kuatnya intervensi institusi finansial global, semacam *International Monetary Fund*-IMF, *World Bank*, *Asian Development Bank*-ADB, *WTO* dalam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Selain itu, bentuk-bentuk kerjasama ekonomi-politik regional (*Asia-Pacific Economic Cooperation*-APEC, *Regional Comprehensive Economic Partnership*-RCEP, *Association of Southeast Asian Nations*-ASEAN, dan sebagainya) merupakan pengejawantahan dari praktik pasar bebas yang merugikan petani, khususnya petani kecil.

Bagi petani, berbagai bentuk kebijakan seperti penghapusan tarif impor

produk-produk pertanian, penghapusan subsidi bagi petani, penerapan paten benih, merupakan bentuk-bentuk diskriminasi bagi petani, karena mengancam kehidupan petani di Indonesia.

Bersama dengan Aliansi 'Gerak Lawan', SPI tercatat cukup aktif dalam merespons berbagai kebijakan pemerintah Indonesia, yang dinilai 'tunduk' terhadap kepentingan kepentingan-kepentingan kapital global. Bentuk-bentuk reaksi yang dilakukan oleh 'Gerak Lawan' meliputi dari mobilisasi massa dalam bentuk demonstrasi, konferensi tandingan.

Beberapa bentuk pelaksanaan konferensi tandingan yang dilakukan oleh 'Gerak Lawan' dapat dilihat dari beberapa agenda besar, seperti mobilisasi massa terkait pelaksanaan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO yang dilaksanakan di Bali pada 4 Desember 2013. 5 Tahun berikutnya, atau pada 2018, Aliansi dalam 'Gerak Lawan' juga melakukan. Mobilisasi menyikapi 'Pertemuan Tahunan IMF – World Bank' yang dihelat di Bali pada 8 – 14 Oktober 2018.

Selain melakukan mobilisasi massa dan memproduksi dokumen-dokumen kampanye yang bersifat kritis, strategi perlawanan lainnya yang juga dilakukan oleh 'Gerak Lawan' adalah dengan melakukan peninjauan ulang atau *judicial review* di Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini dilakukan mengingat terdapat beberapa kebijakan (peraturan hukum) yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang dinilai bertentangan dengan pasal-pasal kerakyatan di Indonesia.

Dari beberapa Judicial Review yang diajukan oleh 'Gerak Lawan', SPI menaruh perhatian khusus terhadap peraturan yang dapat mencederai hak-hak petani. Peraturan-peraturan tersebut diantaranya adalah Undang-Undang Penanaman Modal dan Undang-Undang Perlindungan Pemberdayaan Petani (UU Perlantan). Dalam UU Penanaman Modal, SPI mengkritisi pasal 22 ayat (1) huruf a, b,

dan c, mengenai kemudahan pelayanan dan perizinan atas tanah. Dalam ketentuan pasal 22 tersebut, izin pemberian hak atas tanah dapat diberikan kepada perusahaan penanam modal dengan lama waktu hingga 95 tahun (Hak Guna Usaha), 80 tahun (Hak Guna Bangunan), dan 70 tahun (Hak Pakai).

Hal ini tersebut menurut SPI tidak mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil, khususnya petani, dalam hal kepemilikan tanah. Izin penguasaan tanah tersebut bahkan jauh lebih lama dari ketentuan didalam perundang-undangan kolonial atau *Agrarische Wet* yakni 75 tahun. Pemberian penguasaan tanah dalam jangka waktu yang panjang bagi korporasi swasta asing maupun dalam negeri, dinilai akan melanggengkan terjadinya ketimpangan penguasaan tanah dan hal tersebut jelas-jelas mengingkari semangat dari UUPA 1960, dimana pemenuhan hak petani terhadap tanah diatur, demi terciptanya pemerataan.

Sementara itu terkait *judicial review* UU Perlantan, hal ini berkaitan erat dengan ide hak asasi petani yang merupakan hasil dari 'Konferensi Cibubur' tahun 2001. Hal ini diketahui mengingat usulan awal dari peraturan ini oleh SPI diajukan sebagai Undang-Undang Hak Asasi Petani. Dalam konteks tidak diakuinya kelembagaan petani diluar dari kelompok tani, SPI mendesak agar pasal dalam UU tersebut ditinjau ulang. Dalam argumentasinya, SPI menilai terbatasnya pengakuan kelembagaan petani dalam bentuk kelompok tani dan gabungan kelompok tani sama saja dengan pembatasan terhadap hak petani untuk berserikat.

Selain itu pembentukan aliansi strategis, dalam konteks hak asasi petani, SPI berinisiatif untuk membuat pengawasan atau monitoring terhadap kondisi pelanggaran hak asasi petani di Indonesia. Kegiatan monitoring, yang kemudian diejawantahkan dalam bentuk 'Laporan Pelanggaran Hak Asasi Petani',

dilakukan SPI dengan organisasi masyarakat sipil lainnya, yakni IHCS, dalam bentuk publikasi dan laporan tahunan.

Tujuan dari kegiatan monitoring secara swadaya tersebut ditujukan untuk membangun kesadaran publik terhadap kondisi petani serta pentingnya perlindungan terhadap hak asasi petani. Indikator yang digunakan dalam menyusun laporan perlindungan terhadap hak asasi petani menggunakan poin-poin di dalam 'Deklarasi HAP Indonesia' sebagai indikator untuk mengukur bentuk-bentuk pelanggaran maupun upaya perlindungan dan pemenuhan HAP yang sudah dilakukan pemerintah.

Sementara di tingkat internasional, SPI terkoneksi dengan gerakan petani internasional yang dinamakan 'La Via Campesina'. La Via Campesina memungkinkan SPI memperoleh akses informasi dan jejaring aliansi yang lebih luas di tingkat internasional terkait isu-isu agraria. La Via Campesina juga menjadi pelantang bagi SPI untuk mengampanyekan ide-ide maupun kondisi objektif yang dialami oleh anggotanya di tingkat lokal maupun nasional ke tingkat internasional.

Hal ini semakin signifikan tatkala sejak tahun 2004 sampai dengan 2014, SPI dipercaya sebagai koordinator umum La Via Campesina. Hal inilah yang kemudian menjadi langkah awal SPI membawa konsep hak asasi petani ke tingkat internasional. Pada tahun 2002, bertempat di Jakarta, diselenggarakan 'Konferensi Hak Asasi Petani La Via Campesina' untuk regional Asia Tenggara dan Asia Timur yang menjadikan hak asasi petani sebagai agenda pembahasan utama. Konferensi regional tersebut membahas isi dari 'Deklarasi Hak Asasi Petani Indonesia' yang dihasilkan tahun sebelumnya, dan mendapatkan respon positif dari para

peserta konferensi yang hadir³. Setelah pelaksanaan konferensi regional tersebut, perkembangan ide hak asasi petani di tingkat internasional terus bergulir. Sejak tahun 2003, SPI, melalui La Via Campesina bersama dengan jejaring lainnya di tingkat internasional (*Foodfirst International Action Network*-FIAN dan Centre Europe-Tiers Monde (CETIM)) secara aktif memproduksi laporan-laporan mengenai pelanggaran hak-hak petani yang terjadi di berbagai tempat di dunia untuk kemudian diberikan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Keterbatasan dari instrumen-instrumen internasional tersebut dalam melindungi petani dari kebijakan-kebijakan di level internasional menjadi dorongan lebih agar ide hak asasi petani dapat menjadi sebuah instrumen perlindungan yang diakui. Terkait hal ini, M. Ikhwan, Kepala Departemen Luar Negeri SPI periode 2009 – 2014, menjelaskan latar belakang hal tersebut: "Di internasional, salah satu latar belakangnya adalah kita melihat kelompok rentan/*vulnerable groups* lainnya memiliki instrumen perlindungan, seperti perempuan, anak, sehingga hak-haknya lebih terlihat dan pengakuan. Jadi yang lain sudah ada... *sementara* di Indonesia populasi petani besar, secara historis dia terdiskriminasi...." (Muhammad Ikhwan, 2019).

Momentum menjadikan hak asasi petani sebagai instrumen perlindungan di PBB kemudian datang ketika krisis pangan global terjadi pada rentang waktu tahun 2007-2008. Krisis tersebut kemudian mendesak PBB, melalui FAO, mencari akar masalah mengenai krisis pangan tersebut terjadi. La Via Campesina lantas muncul dan menawarkan kerangka perlindungan

³ Konferensi Regional Hak Asasi Petani La Via Campesina untuk wilayah Asia Tenggara dan Asia Timur menghasilkan 'Deklarasi Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Petani'. Terdapat perubahan isi dan penambahan pasal, dari yang semulanya 8 (hasil Konferensi Cibubur) menjadi 10 pasal.

dan pemenuhan hak-hak petani di masa yang akan datang sebagai solusi untuk mengatasi krisis pangan di dunia. Hal ini dinilai logis mengingat perlindungan terhadap petani, berarti perlindungan terhadap produsen pangan.

Bersamaan dengan terjadinya krisis pangan global, di tataran internal La Via Campesina upaya-upaya untuk mematangkan ide hak asasi petani terus dilakukan. Pada Juni 2008, dilaksanakan 'Konferensi Internasional Hak Asasi Petani' di Jakarta. Hasil dari 'Konferensi Internasional Hak Asasi Petani' di Jakarta kemudian dibawa ke dalam Konferensi ke-5 La Via Campesina di Maputo, Mozambik, pada tahun yang sama. Konferensi Maputo kemudian mengeluarkan resolusi yang dikenal sebagai 'Deklarasi Maputo', yang isinya menyatakan perlunya hak asasi petani menjadi sebuah sistem perlindungan internasional.

Hal ini terus berlanjut hingga pada tahun 2009, Dewan Hak Asasi Manusia PBB memberikan mandat kepada Komite Penasihat untuk melakukan studi tentang diskriminasi dalam konteks hak atas pangan. Pada bulan Maret 2012, Komite ini mempresentasikan Studi Akhir tentang kemajuan hak asasi petani dan masyarakat yang bekerja di daerah perdesaan. Komite memberi rekomendasi agar Dewan Hak Asasi Manusia PBB menetapkan mandat baru untuk prosedur khusus demi memperkuat promosi dan perlindungan hak asasi petani dan masyarakat yang bekerja di daerah perdesaan dan mengembangkan instrumen internasional.

Dalam proses lobi untuk pengesahan 'Deklarasi Hak Asasi Petani dan Masyarakat yang Bekerja di Pedesaan' mekanisme dalam Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengharuskan usulan dari suatu resolusi harus dibawa oleh negara-negara anggota Dewan HAM PBB. Hal ini berarti, institusi negara diperlukan sebagai pihak yang menjadi sponsor dan co-sponsor resolusi.

Terkait hal tersebut, SPI ikut aktif dalam membuka komunikasi dengan negara-negara anggota Dewan HAM PBB perihal kesediaan untuk menjadi sponsor utama resolusi⁴. Hal yang sama juga dilakukan SPI selama proses lobi berlangsung. SPI memiliki peranan penting dalam berkoordinasi dengan perwakilan Pemerintah Indonesia. Selain memastikan dukungan Indonesia terhadap resolusi hak asasi petani, SPI yang merupakan *leader* La Via Campesina Regional Asia Timur dan Asia Tenggara melakukan tugas-tugas diplomasi ke negara-negara Asia-Afrika untuk mendukung pengesahan resolusi hak asasi petani.

Tahun 2018 menjadi tahun krusial menuju pengesahan hak asasi petani sebagai sebuah instrumen perlindungan internasional. Pada bulan April, Kelompok Kerja ke-5 Antar Pemerintah dari Dewan Hak Asasi Manusia (*The 5th Open-ended Intergovernmental Working Group of the Human Rights Council/HRC*) merampungkan negosiasi dan melakukan finalisasi pada teks untuk deklarasi hak asasi.

Pemungutan suara untuk pengesahan deklarasi kemudian berlanjut pada tanggal 17 Desember 2018, dalam sesi ke-73 Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, *United Nations Declaration on the Rights of Peasant and Working People in Rural Areas* (UNDROP) atau "Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani dan Masyarakat yang Bekerja di Perdesaan" resmi disahkan.

Dari 193 negara anggota PBB, sebanyak 121 suara mendukung untuk pengesahan Deklarasi PBB tentang Hak

⁴ Setelah melalui proses lobi dan komunikasi yang dilakukan La Via Campesina dan jejaringnya, Bolivia setuju menjadi negara utama yang mensponsori hak asasi petani menjadi sebuah deklarasi. Hal ini kemudian diikuti oleh Afrika Selatan, Kuba, Venezuela dan Ekuador selaku *co-sponsor*

Asasi Petani dan Masyarakat yang Bekerja di Perdesaan, sementara 8 suara menentang dan 54 suara lainnya abstain. Dalam pemungutan suara terakhir, pemerintah Indonesia menyatakan bersedia sebagai salah satu *co-sponsor* Deklarasi Hak Asasi Petani.

Proses Pembangkaan Kultural

Proses pembangkaan kultural dapat dimaknai sebagai upaya-upaya langsung untuk mempengaruhi pemerintah, pemilihan umum, dan agenda publik juga bagian utama gerakan sosial. Dalam hal ini makna-makna diproduksi oleh para partisipan gerakan untuk melegitimasi dan memotivasi lahirnya aksi kolektif (McAdam, McCarthy & Zald, 1996).

Konstruksi Isu Gerakan: Kerangka Hak Asasi Petani sebagai bentuk Perjuangan Petani yang Baru. Dalam setiap konflik agraria yang terjadi, pelanggaran atas hak-hak petani, seperti hak atas tanah dan hak-hak lainnya, kerap kali terjadi. Kondisi ini terjadi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, sehingga mengakibatkan petani tidak memiliki kesadaran lagi atas hak-haknya (menganggap hal tersebut terberikan atau *given*), mengingat kondisi penindasan dan pelanggaran yang terjadi sudah dalam waktu yang lama.

Ide mengenai hak asasi petani merupakan sebuah upaya penyadaran terhadap petani bahwa kondisi yang dialaminya bukanlah sesuatu yang ideal. Kerangka hak asasi petani, menurut SPI dianggap dapat digunakan sebagai isu perjuangan yang alternatif dan tergolong baru, mengingat upaya penyelesaian konflik-konflik agraria dan perlindungan hak-hak petani di Indonesia belum memiliki kerangka yang jelas.

Kemunculan hak asasi petani sebagai kerangka perjuangan alternatif tidak dapat dilepaskan dari dua hal, yakni terkait dengan re-orientasi mengenai petani sebagai warga negara dan pengaruh terbukanya sistem politik di Indonesia

pasca lengsernya Orde Baru, sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Ikhwan: "Karena dalam perjalanannya, tidak ada pengakuan terhadap petani, petani dianggap sebagai warga negara kelas dua. Dari sejarahnya juga, petani mengalami diskriminasi dan marginalisasi secara besar-besaran. Penindasan yang sudah terjadi berlarut-larut tersebut, karena sudah terlalu lama, orang-orang menganggap ini menjadi sesuatu yang *given*, hal yang wajar.... SPI saat itu ingin menyatakan bahwa petani bukan masyarakat kelas dua, dia punya hak dan hak asasinya sama dengan masyarakat lainnya.... sementara di tingkat internasional, salah satu latar belakangnya adalah kita melihat kelompok rentan/*vulnerable groups* lainnya memiliki instrumen perlindungan, seperti perempuan, anak, sehingga hak-haknya lebih terlihat dan pengakuan..." (Wawancara dengan Muhammad Ikhwan).

Proses mengonstruksi hak asasi petani sebagai sebuah kerangka perjuangan alternatif dilakukan SPI melalui proses pengumpulan masalah-masalah yang dialami oleh petani sendiri. Pertanyaan-pertanyaan dasar seperti '*apa sebenarnya hak itu?*', '*petani harusnya memiliki apa?*', '*masalah-masalah apa yang dihadapi petani?*', '*bagaimana cara mengatasinya?*', dan sebagainya, menjadi kerangka awal hak asasi petani. Hal ini dikemukakan oleh Henry Saragih sebagai berikut: "...tahun 90an awal (SPI) sudah punya juga cikal bakal hak asasi petani (HAP) karena kita kan menggunakan metode pendidikan yang disebut *Experience Learning Circle* (ELC). ELC itu adalah disuruh rakyat mendaftar apa-apa saja yang menjadi harapan-harapan yang masalahnya. Sehingga terdaftarlah, '*apa hak kita sebagai petani?*'. Jadi waktu itu kita sudah melahirkan draf mengenai masalah-masalah petani." (Wawancara dengan Henry Saragih).

Petani dalam hal ini menjadi pihak yang secara langsung berbicara dan

menyampaikan segala kondisi dan masalah-masalah yang dihadapinya. Hak asasi petani sebagai sebuah kerangka perjuangan yang baru kemudian dielaborasi dengan pokok perjuangan SPI lainnya, yakni pembaruan agraria, sebagaimana dikemukakan oleh Henry Saragih sebagai berikut: “Tahun 1998-1999 kita sudah melihat bahwa SPI harus mengakomodir gagasan-gagasan ini (*hak asasi petani*), bagaimana memprogresifkan gagasan-gagasan yang ada. Bukan justru membiarkan dia menjadi gagasan yang tidak progresif. Maka ini harus kita masukkan (*hak asasi petani*) dalam bingkai perjuangan reforma agraria” (Wawancara dengan Henry Saragih, 2018).

Elaborasi antara kedua pokok gerakan tersebut oleh SPI, menurut peneliti memungkinkan mengingat tidak terdapat perbedaan yang mendasar dari masing-masing pokok gerakan tersebut. Dalam pembaruan agraria, terdapat ketentuan untuk menghilangkan ketimpangan agraria dengan pembatasan kepemilikan tanah bagi para pelaku usaha. Hal tersebut selaras dengan definisi dari hak-hak petani atas faktor produksi yang mendasar, seperti hak atas tanah, hak atas bibit, dan hak-hak lainnya.

Menurut penulis, dengan adanya UNDROP target yang hendak ingin dicapai adalah prinsip kesetaraan sebagai manusia, mengingat petani kerap kali diposisikan tidak sebagai subjek melainkan objek dalam setiap peristiwa maupun kejadian. UNDROP dalam hal ini

Di dalam UNDROP, dapat dilihat bagaimana pasal-pasal yang ada mengatur bagaimana kewajiban negara untuk melindungi hak-hak yang melekat pada petani dan orang-orang yang bekerja di pedesaan. Cakupan dari hak-hak petani juga menjadi semakin luas, tidak hanya mengatur kewajiban negara untuk memenuhi dan melindungi hak-hak petani atas faktor-faktor produksinya (hak atas tanah, benih, air, pengelolaan sumber daya alam dan konservasi), tetapi juga

mencakup hak untuk berserikat dan berorganisasi, hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat, hak untuk mendapatkan penghasilan atau penghidupan yang layak, dan hak-hak yang menyangkut kehidupan sosial, dan budaya masyarakat.

Difusi isu di Luar Gerakan: Pengaruh Jejaring Internasional dalam Perkembangan Kerangka Perjuangan Hak Asasi Petani. Perkembangan ide hak asasi petani di tingkat internasional tidak terlepas dari pengaruh dinamika yang terjadi pada saat proses perumusan. Hal ini berlangsung baik itu di internal La Via Campesina sendiri, maupun ketika pembahasan di PBB. Seperti yang diketahui, ide mengenai hak asasi petani bersumber dari ‘Deklarasi HAP Indonesia’. Hal tersebut kendati mendapatkan respon yang positif dari jejaring-jejaring SPI di tingkat internasional, juga mendapatkan masukan terkait substansi deklarasi. Dalam beberapa forum internal organisasi, ide mengenai hak asasi petani juga diharapkan dapat merangkul elemen-elemen masyarakat lainnya, yang memiliki karakteristik yang sama dengan petani, seperti sama-sama kelompok yang rentan akan diskriminasi dan marjinalisasi.

Hal ini kemudian mengakibatkan terjadi penambahan frasa dalam naskah deklarasi yang diperjuangkan, yakni dari yang semulanya ‘Deklarasi Hak Asasi Petani’ menjadi ‘Deklarasi Hak Asasi Petani dan Masyarakat yang Bekerja di Pedesaan’. Selanjutnya, dalam proses perumusannya di PBB sejak tahun 2010, nama yang digunakan untuk instrumen perlindungan tersebut adalah ‘Deklarasi Hak Asasi Petani dan Masyarakat yang Bekerja di Pedesaan’ atau UNDROP.

Keikutsertaan masyarakat yang bekerja di pedesaan dalam deklarasi ini menjadikan isu yang diperjuangkan menjadi lebih luas dan bersifat inklusif. Hal ini dikemukakan oleh Henry Saragih sebagai berikut:

“Yang menarik, waktu 2008 itu kita kan cuma Deklarasi Hak Asasi Petani. Setelah masuk naskah akademik, kajian global itu, dia berubah menjadi hak asasi petani dan orang yang bekerja di pedesaan. Dimasukkanlah di situ nelayan, para pemburu, pokoknya buruh tani, terakhir masyarakat adat yang petani, jadi tidak terbatas pada petani saja.” (Wawancara dengan Saragih, 2018)

Peneliti melihat upaya penambahan frasa ‘masyarakat yang bekerja di pedesaan’ selain berimplikasi kepada inklusifitas perjuangan, juga menunjukkan bahwa terdapat kekosongan ruang bagi perlindungan masyarakat-masyarakat di pedesaan. Tidak adanya instrumen yang melindungi masyarakat pedesaan mengakibatkan kelompok tersebut sama-sama rentan seperti petani. Oleh karena itu, penambahan frasa tersebut, memiliki implikasi positif dalam konteks menyediakan perlindungan yang luas bagi kelompok-kelompok yang rentan.

Karakteristik petani dan masyarakat-masyarakat pedesaan apabila dilihat lebih jauh juga tidak jauh berbeda. Kedua identitas tersebut sama-sama memiliki ketergantungan terhadap sumber daya alam (petani terhadap tanah dan sumber air, nelayan terhadap wilayah pesisir, peternak dan penggembala terhadap kesediaan ruang) sebagai faktor produksi mereka. Selain itu, peneliti melihat terdapat faktor solidaritas atau ‘senasib sepenanggungan’, yang dialami oleh masyarakat pedesaan, sama dengan petani akibat dari intervensi neoliberalisme dalam berbagai sektor kehidupan.

SIMPULAN

Dalam menganalisis keberhasilan SPI dalam perjuangan hak asasi petani di Indonesia, teori integrasi gerakan sosial cukup mumpuni dalam melihat bagaimana masing-masing dimensi (struktur kesempatan politik, struktur mobilisasi, dan pembingkai kultural) memainkan pengaruhnya. Teori integrasi gerakan

sosial mencoba mensintesis berbagai dimensi, dan coba menunjukkan bahwa keberhasilan maupun kegagalan suatu gerakan sosial dalam mendesak isu, merupakan hasil dari saling mempengaruhinya dimensi-dimensi yang ada.

Relevansi teori integrasi gerakan sosial dengan studi kasus yang diangkat dalam penelitian ini dapat dilihat dari bagaimana kombinasi antara faktor keterbukaan politik di Indonesia, keberhasilan SPI dalam menjalin jejaring aliansi di berbagai tingkatan (lokal-internasional), dan konstruksi ide mengenai hak asasi petani yang dapat diterima secara universal. Hal tersebut kemudian menghasilkan instrumen di tingkat internasional yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi petani yakni ‘Deklarasi Hak Asasi Petani dan Masyarakat yang Bekerja di Pedesaan’ atau (UNDROP). Keberhasilan SPI tersebut, bukan semata-mata didorong oleh dominannya suatu dimensi, melainkan saling melengkapinya masing-masing dimensi tersebut sehingga perjuangan SPI terkait hak asasi petani berkesinambungan dan bahkan berkembang sampai ke tingkat internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. (2017). Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2017. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Creswell, J. (2016). Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran Edisi 4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Doug McAdam, J. D. (1996). Comparative Perspective on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings. (J. D. Doug McAdam, Penyunt.) Cambridge: Cambridge University.
- Fauzi, N. (2012). Land Reform dari Masa ke Masa. Bogor: Sajogyo Institute dan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Harahap, H. (2000). Realitas Petani dan Organisasi Petani di Media Massa: Hegemoni Negara dalam Wacana Media. Tesis, Pascasarjana Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia.
- John D. McCarthy, M. N. (1977). Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory. American Sociological Review, Vol. 53, No.2, May 1977, 1212-1241.

- KPA. (2017). Catatan Akhir Tahun: Liberalisasi Agraria Diperhebat, Reforma Agraria Dibelokkan. Jakarta.
- La Via Campesina. (2009). *La Via Campesina Policy Documents*. Mei: Jakarta.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2013). Putusan Nomor 87/PUU-XI/2013. Jakarta.
- Mas'ood, M. (1989). *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966 – 1971*. Jakarta: LP3ES.
- McAdam, D. (1996). Conceptual origins, current problems, future directions. Dalam J. D. Doug McAdam, *Comparative Perspective on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings*. Cambridge: Cambridge University.
- McAdam, D. McCarthy, J.D., & Zald, M.N. (1996). *Comparative Perspective on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings*. New York: Cambridge University Press.
- Purwanto, H. (2012). *Serikat Petani Indonesia dalam Perjuangan Pembaruan Agraria di Indonesia Periode 1998-2011*. Tesis, Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
- Serikat Petani Indonesia. (2003). *Pandangan dan Sikap Dasar Federasi Serikat Petani Indonesia Tentang Pembaruan Agraria*. Malang.
- Serikat Petani Indonesia. (2019). *Dari Desa untuk Dunia: 'Perjuangan Petani Demi Pengakuan Hak Asasi Petani dan Masyarakat yang Bekerja di Pedesaan'*. Jakarta.
- Situmorang, A. W. (2013). *Gerakan Sosial: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka
- SPI, & IHCS. (2015). *Laporan Pelanggaran Hak Asasi Petani 2015*. Jakarta.
- Strauss, A., & Corbin, J. (2003). *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tatalangkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi data*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syahyuti. (2013). *Pemahaman Terhadap Petani Kecil Sebagai Landasan Kebijakan Pembangunan Pertanian*. Forum Penelitian Agro Ekonomi, Volume 31, No.1, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Wahono, F. (2005). *Hak-Hak Asasi Petani dan Proses Perumusannya*. Yogyakarta: Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas.